PERILAKU CAMAT DALAM PELAKSANAAN PNPM MANDIRI DI KECAMATAN PUTUSSIBAU UTARA KABUPATEN KAPUAS HULU

Tia Arniyati Permatasari

Program Studi Ilmu Pemerintahan Kerjasama Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura
dengan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat

E-mail : tiaarniyatipermatasari@rocketmail.com

Abstrak

Penulisan skripsi ini dimaksudkan untuk mengetahui sejauh mana perilaku camat dalam pelaksanaan PNPM Mandiri Perdesaan di Kecamatan Putussibau Utara yang ditinjau dari perilaku menyebarkan informasi, konsultasi dan delegasi, perencanaan dan pengorganisasian serta pemantauan program tersebut. Judul skripsi ini diangkat berdasarkan permasalahan mengenai kegiatan yang dilakukan PNPM Mandiri erdesaan yaitu Simpan Pinjam Perempuan (SPP) melakukan penunggakan uang. Padahal perilaku pemantauan sudah dilakukan dengan benar. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan menggunakan metode kualitatif. Pengumpulan data menggunakan teknik wawancara dan dokumentasi. Subjek penelitian adalah camat, kasi ekbang, Tim unit pelaksana kegiatan (UPK) kecamatan Putussibau Utara dan salah satu masyarakat. Kesi pulan dalam penelitian ini adalah perilaku camat yang diterapkan dalam pelaksanaan PNPM Mandiri Perdesaan sudah baik, ada sedikit hambatan yang ditimbulkan dari masyarakat yaitu menunggak uang dalam kegiatan Sim an Pinjam Perempuan. Untuk itu, camat sebagai pemimpin tertinggi di kecamatan harus mengadakan pemantauan lebih ketat dan tegas agar tidak ada lagi penunggakan uang dalam kegiatan PNPM Mandiri Perdesaan.

Kata kunci : Perilaku Camat, Kepemimpinan, Ketegasan, dan Pelaku PNPM Mandiri Perdesaan.

Abstract

The Process of Writing this inscription is intended to identify the behavior of districk in the execution of Rural Autonomous National Programme for Society Empowerment in North Putussibau Districk which is observed from the behavior of Spreading information, consultation and delegation, plannin and organizing, and monitoring the programme. The title is choosen based on issue related to the programme about arrears in money from Saving and Lending for Women. Whereas the monitoring is alone correctly. This study uses a descriptive type of research with a qualitative approach. Collecting data uses interview technique and documentation. Subjects of the research are head of districk, head of economic and development sectio , Programme Executor Unit in North Putussibau Districk and me of the citizen who is choosen purposively. The conclusion of this study is behavior of Head of Districk which is applied in the execution of Rural Autonomous National Programme for Society Empowerment has gone on well, but there's an obstacle that is caused by people in arrears from the programme of Saving and Leading for Women. That's why, Head of Districk as the highest leader in districk has to do more intensive and firm monitoring in order to unit the arrears in the execution of Rural Autonomous National Programme for Society Empowerment.

Keywords : Behavior of Head of Districk, Leadership, Firmness, and The executor of Rural Autonomous National Programme for Society Empowerment.

A. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang Penelitian

Kepemimpinan menjadi hal menarik untuk diteliti ketika berbicara mengenai perilaku maupun gaya kepemimpinan. Dalam ranah ilmu Pemerintahan, kepemimpinan yang baik berperan penting dalam penyelenggaraan pemerintahan. Salah satu tingkatan pimpinan dalam sistem penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia adalah Camat.

Camat sebagai perangkat wilayah kecamatan mempunyai tupoksi memimpin, membina dan menyelenggarakan kewenangan pemerintah daerah yang dilimpahkan oleh kepala daerah untuk menagani sebagian urusan otonomi daerah. Salah satu tugas umumnya adalah mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat. Masyarakat adalah pelaku-pelaku utama PNPM (Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat) Mandiri Perdesaan pada tahap perencanaan, pelaksanaan dan pelestarian. Sedangkan pelaku lainnya di desa, kecamatan, kabupaten dan seterusnya sebagai pelaksana, fasilitator, pembimbing dan pembina agar tujuan mekanisme PNPM Mandiri dilaksanakan secara benar dan konsisten.

PNPM Mandiri Perdesaan merupakan bagian dari Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri yang dicanangkan pemerintah sesuai dengan Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2005 tentang Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan. Mulai tahun 2007 Pemerintah Indonesia mencanangkan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri yang terdiri dari PNPM Mandiri Perdesaan, PNPM Mandiri Perkotaan, dan PNPM Mandiri wilayah khusus (perbatasan) serta desa tertinggal. PNPM Mandiri Perdesaan adalah program untuk mempercepat

penanggulangan kemiskinan secara terpadu dan berkelanjutan. Pendekatan PNPM Mandiri Perdesaan merupakan pengembangan dari Program Pengembangan Kecamatan (PPK), yang selama ini dinilai berhasil. Beberapa keberhasilan PPK adalah berupa penyediaan lapangan kerja dan pendapatan bagi kelompok rakyat miskin, efisiensi dan efektivitas kegiatan, serta berhasil menumbuhkan kebersamaan dan partisipasi masyarakat.

Camat atas nama bupati berperan sebagai pembina pelaksanaan PNPM Mandiri Perdesaan pada desa-desa di kecamatan. Selain itu camat juga bertugas untuk mengesahkan usulan-usulan kegiatan yang telah disepakati dalam Musyawarah Antar Desa (MAD) untuk didanai melalui PNPM Mandiri Perdesaan, dalam bentuk Surat Penetapan Camat (SPC). Tugas dan tanggung jawab camat sesuai dengan penjelasan PTO Menteri Dalam Negeri yaitu:

- a. Bertanggung jawab terhadap pelaksanaan PNPM Mandiri Perdesaan di wilayah kecamatan.
- b. Mengkoordinasikan seluruh kegiatan pembangunan yang ada di kecamatan.
- c. Menjalankan MAD.
- d. Bersama fasilitator kecamatan dan PjOK mensosialisasikan PNPM Mandiri Perdesaan di wilayah kecamatan.
- e. Memonitoring dan mengevaluasi laporan pertanggungjawaban pelaksanaan PNPM Mandiri Perdesaan dari semua desa.
- f. Membantu penyelesaian masalah PNPM Mandiri Perdesaan yang timbul di wilayahnya.
- g. Melayani urusan administratif, antara lain : menandatangani surat penetapan tim verifikasi, pengurus, usulan kegiatan, Surat Perjanjian Pemberian Bantuan (SPPB),

Surat Penetapan Camat (SPC) dan Surat Pernyataan Penyelesaian Kegiatan (SP2K) yang dibuat oleh Ketua TPK dan Penanggung Jawab Operasional Kegiatan (PJOK), dll.

- h. Memantau proses pemeliharaan dan rencana pengembangan hasil kegiatan serta pengembalian pinjaman dana bergulir.
- i. Menilai kinerja program di desa dan kecamatan.
- j. Bertanggung jawab terhadap pengelolaan seluruh dokumen kegiatan PNPM Mandiri Perdesaan baik yang bersifat keuangan dan non keuangan.
- k. Mendorong dan memfasilitasi terbentuk dan berkembangnya Badan Kerja sama Antar Desa (BKAD).

Dalam rangka pengembangan sebuah program pembangunan seperti PNPM Mandiri Perdesaan, maka peranan pengendalian dari pada pemerintah tidak dapat dipungkiri. Apalagi kebijakan PNPM ini harus dapat dipertanggungjawabkan baik secara administratif bahkan untuk jaminan keberlanjutannya. Dalam hal inilah, camat sebagai pemimpin tertinggi di wilayah kecamatan harus mampu melaksanakan pengendalian dalam berbagai urusan pemerintah dan upaya pembangunan. Secara administratif kecamatan yang dipimpin oleh camat harus mampu memberikan kemudahan-kemudahan dan bahkan pelayanan administrasi bagi masyarakat termasuk dalam mensukseskan implementasi PNPM Mandiri Perdesaan.

Kecamatan Putussibau Utara Kabupaten Kapuas Hulu pada tahun 2013 ini mendapat Dana dari Pemerintah sebesar Rp 6 (enam) Milyar dan tidak boleh dibiarkan mengendap terlalu lama. Petugas pemerintah atau yang ditugasi dalam mengarahkan program ini,

memang masih mengalami kekurangan dikarenakan luasnya jangkauan wilayah kerja mereka. Hal ini juga menjadi tugas camat untuk menunjukkan komitmen pemerintah untuk senantiasa memberikan arahan bimbingan dan dukungan administrasi, sehingga akan terjadi proses belajar yang terus menerus.

PNPM Mandiri Perdesaan di Kecamatan Putussibau Utara telah mengeluarkan banyak dana di kegiatan Sarana/Prasarana yaitu sebesar Rp 5.667.000.000 sedangkan sisa dana sebesar Rp 333.000.000 untuk Kegiatan Simpan Pinjam khusus Perempuan. Dalam hal ini, peneliti menemukan masalah dalam kegiatan yang dilaksanakan oleh PNPM Mandiri yaitu Kegiatan Simpan Pinjam khusus Perempuan (SPP) di Kelurahan Hilir Kantor, Nanga Sibus dan Nanga Awin, mereka menunggak uang sebesar Rp 100.000.000 sehingga terjadi masalah dalam hal pengelolaan dana.

Masyarakat merupakan pelaku utama dalam program ini, pemerintah hanya sebagai pendamping dan penunjang. Akan tetapi walaupun dalam posisi demikian, karena pengalaman masyarakat terutama dalam menyusun dan melaksanakan program dengan dana yang datangnya dari pemerintah, dimana dana atau uang tersebut harus dilaporkan dengan baik, dengan sistem pembukuan yang telah dibukukan membuat masyarakat peserta PNPM Mandiri sedikit mengalami kesulitan. Peranan camat dalam hal ini sangat urgen, dapat mengendalikan perangkat di kecamatan untuk dapat memberikan pendampingan atau pengarahan utama dalam penyusunan administrasi sehingga penunggakan uang bisa teratasi. Berdasarkan hal tersebut, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian tentang perilaku camat dalam pelaksanaan dan pembinaan SPP PNPM Mandiri Perdesaan di

Kecamatan Putussibau Utara Kabupaten Kapuas Hulu.

2. Rumusan Permasalahan

Dari pembatasan permasalahan di atas, maka masalah dapat dirumuskan sebagai berikut : Bagaimana perilaku camat dalam membina program SPP PNPM Mandiri Perdesaan di Kecamatan Putussibau Utara?

3. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui perilaku camat dalam menyebarkan informasi, konsultasi dan delegasi, perencanaan dan pengorganisasian serta pemantauan pelaksanaan SPP PNPM Mandiri Perdesaan di Kecamatan Putussibau Utara.

4. Manfaat Penelitian

a. Manfaat Teoritis

Adanya penelitian ini diharapkan mampu memberikan sumbangan pengetahuan terhadap ilmu sosial, khususnya di bidang kepemimpinan dalam Pemerintahan Kecamatan.

b. Manfaat Praktis

Bagi pihak masyarakat, dapat memberikan masukan dan pemikiran yang baik mengenai pelaksanaan PNPM Mandiri Perdesaan khususnya kegiatan SPP di Kecamatan Putussibau Utara Kabupaten Kapuas Hulu. Bagi pihak di bidang pemerintahan, khususnya Pemerintah Kecamatan Putussibau Utara untuk dapat menambah pengetahuan ataupun informasi tentang upaya pengembangan PNPM Mandiri Perdesaan. Hasil dari penelitian ini dapat memberikan pemahaman Bagi Mahasiswa, khususnya mahasiswa Ilmu Pemerintahan mengenai perilaku pemimpin dalam pelaksanaan PNPM Mandiri Perdesaan sehingga mereka mampu untuk melihat realita yang ada.

B. TUJUAN TEORI DAN METODOLOGI

1. Tujuan Teori

Perilaku Pemimpin Adalah suatu pendekatan yang menekankan pada apa yang dilakukan secara nyata oleh seseorang pemimpin di dalam jabatannya. Pendekatan ini muncul setelah pendekatan berdasarkan ciri-ciri kepribadian dan situasional yang berkombinasi menjadi konsep perilaku pemimpin yang merupakan deskripsi dari perilaku pemimpin (dalam Kaloh:2009). Perilaku kepemimpinan merupakan suatu tindakan yang dilakukan pemimpin secara terus menerus yang karena kemampuannya dapat menggerakkan orang lain untuk melakukan sesuatu dalam rangka pencapaian tujuan. Perilaku pemimpin yang efektif, yaitu tindakan nyata yang dilakukan pemimpin di dalam pekerjaannya, sehingga kegiatan organisasi berlangsung secara efektif. Ada 11 jenis-jenis perilaku pemimpin menurut Kaloh yaitu :

a. Perilaku menyebarkan informasi (*informating*)

Yaitu perilaku atau tindakan pemimpin dalam menyebarkan informasi yang relevan seperti keputusan dan rencana, memberi informasi teknis yang dibutuhkan bawahan dalam melakukan pekerjaannya, menginformasikan kepada bawahan tentang kemajuan yang dicapai organisasi secara keseluruhan. Organisasi pemerintah yang berorientasi pelayanan masyarakat, penyebaran informasi dalam rangka pengenalan maupun promosi organisasi kurang penting untuk dilakukan, karena yang terpenting adalah bagaimana member pelayanan sebaik-baiknya kepada masyarakat. Selain itu, pimpinan organisasi pemerintah terikat dengan ketentuan-

ketentuan yang berlaku sehingga untuk menyebarkan informasi yang berhubungan dengan kebijaksanaan maupun rencana kerja organisasi, cenderung menutupi diri. Oleh karena itu, para pimpinan organisasi pemerintahan bersifat hati-hati dalam setiap informasi yang diberikan, baik terhadap staf maupun masyarakat.

b. Perilaku konsultasi dan delegasi (*consulting and delegating*)

Perilaku konsultasi dan delegasi, yaitu perilaku atau tindakan pemimpin untuk membahas bersama pihak lain sebelum membuat keputusan, memberikan saran yang dapat mendorong kemajuan, memberikan kesempatan atau keleluasan kepada bawahan untuk mengambil keputusan secara mandiri, menampung ide dan saran dari bawahan sebelum mengambil keputusan serta member kesempatan kepada bawahan untuk melaksanakan tanggung jawab atas pelaksanaan tugas pokok. Perilaku pemimpin yang cenderung melakukan konsultasi dan delegasi dalam setiap proses pengambilan kebijakan/keputusan dipandang sebagai aspek penting dalam memparipurnakan keputusan yang diambil. Seorang pemimpin yang tinggi perilaku konsultasi dan delegasi akan mengundang berbagai pihak untuk membahas bersama suatu topik atau menampung ide dan saran bawahan sebelum membuat keputusan.

c. Perilaku perencanaan dan pengorganisasian (*planning and organizing*)

Yaitu perilaku atau tindakan pemimpin dalam wujud merumuskan tujuan dan strategi untuk dapat menyesuaikan dengan perubahan lingkungan, merumuskan bagaimana mengalokasikan dan memanfaatkan sumber daya manusia dalam rangka pencapaian tujuan, merumuskan bagaimana mengembangkan

efisiensi dalam pelaksanaan kegiatan, dan bagaimana melakukan koordinasi yang baik dengan pihak lain. Untuk mencapai tujuan yang efektif dan efisien, diperlukan perencanaan terhadap kegiatan yang akan dilakukan. Rencana berfungsi sebagai pengarah kegiatan, alat control penyimpangan, bahkan sebagai strategi pencapaian tujuan. Oleh karena itu, setiap organisasi sebelum melakukan sesuatu kegiatan selalu terlibat dalam proses perencanaan. Pimpinan organisasi sebagai penanggung jawab jalannya organisasi, tidak lepas dari proses perencanaan, karena pada akhirnya hasil proses perencanaan harus diputuskan oleh pimpinan organisasi.

d. Perilaku pemecahan masalah (*problem solving*)

Yaitu perilaku tindakan pemimpin dalam mengidentifikasi masalah-masalah yang berhubungan dengan pekerjaan, menganalisis masalah secara sistematis dan terus menerus guna mengidentifikasi penyebab dan menemukan pemecahannya, konsekuen melaksanakan keputusan dan tegas dalam mengatasi masalah atau krisis yang dihadapi organisasi. Perilaku pemecahan masalah dipandang penting, karena setiap organisasi dalam usaha mencapai tujuan tidak lepas dari berbagai permasalahan, baik yang datang dari dalam maupun dari luar organisasi. Pemimpin organisasi bertanggung jawab dalam menetralisasikan permasalahan yang timbul sehingga tidak mengganggu jalannya tugas organisasi, baik melalui berbagai kebijaksanaan maupun tindakan nyata.

e. Perilaku merumuskan peranan dan tujuan (*clarifying*)

Yaitu perilaku atau sikap dan tindakan pemimpin dalam wujud merumuskan tugas-tugas, menetapkan arah pekerjaan, member pengertian tentang tanggung jawab yang

diemban sehubungan dengan jabatan, merumuskan tujuan yang akan dicapai, menentukan batas waktu penyelesaian tugas, dan mengarahkan bawahan dalam penyelenggaraan tugas-tugas organisasi.

f. Perilaku pemantauan (*monitoring*)

Yaitu perilaku atau sikap dan tindakan pemimpin guna memperoleh informasi tentang kegiatan kerja, melakukan pengecekan tentang kemajuan dan kualitas pekerjaan, evaluasi kinerja bawahan dan unit instansi di lingkungan organisasi dan melakukan pengamatan untuk mengetahui berbagai peluang dan hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan tugas-tugas dan program organisasi. Dalam organisasi pemerintahan, di mana pemantauan biasanya dilakukan oleh pimpinan tingkat bawah, yang hasilnya dilaporkan pada pimpinan tingkat atas, sedangkan pimpinan tingkat atas hanya kadang-kadang memantau langsung kegiatan yang dilakukan bawahannya. Kurangnya perilaku pemantauan yang dilakukan pimpinan tingkat atas disebabkan karena begitu kompleksnya tugas yang dihadapi sehingga untuk melakukan pemantauan hanya disesuaikan dengan ketersediaan waktu untuk itu.

g. Perilaku motivasi

Yaitu perilaku atau sikap dan tindakan pemimpin untuk mempengaruhi emosi bawahan dengan menggunakan nilai-nilai serta logika guna mendorong antusiasme atau semangat kerja pegawai, menumbuhkan komitmen terhadap tujuan dan tugas, bersedia melakukan kerja sama, memberi bantuan dan dukungan. Pemberian motivasi dimaksudkan untuk mempengaruhi emosi bawahan dan menumbuhkan komitmen terhadap tugas dan tujuan serta mengembangkan kerja sama, yang diharapkan dapat meningkatkan semangat dan

kegairahan bawahan dalam menjalankan tugasnya.

h. Perilaku mencegah konflik

Perilaku mencegah konflik dan mengembangkan kelompok berada pada kategori bawah atau jarang dilakukan Kepala Daerah, karena untuk mencegah konflik di kalangan staf merupakan tanggung jawab pimpinan unit kerja masing-masing. Demikian pula dalam mengembangkan kelompok dalam suatu kerja sama yang harmonis.

i. Perilaku dukungan (PD)

Berada pada kategori tengah atau kadang-kadang dilakukan oleh Kepala Daerah karena pengaruh iklim kerja, dimana keakraban atau kedekatan hubungan pimpinan dengan staf atau masyarakat dalam kenyataan sehari-hari tetap diwarnai oleh kesan hubungan hierarkhis.

j. Perilaku informasi (PI)

Berada pada kategori bawah atau jarang dilakukan oleh kepala daerah. Terwujud dalam tindakan pemimpin untuk menyebarkan informasi yang relevan seperti keputusan dan rencana atau memberi teknis yang dibutuhkan bawahan dalam melakukan pekerjaannya, menginformasikan kepada bawahan tentang kemajuan yang telah diapai organisasi secara keseluruhan ternyata jarang digunakan oleh kepala daerah.

k. Perilaku membuat jaringan

Perilaku membuat jaringan yang dibuat Kepala Daerah karena setiap kegiatan yang dilaksanakan baik dalam bentuk program maupun proyek telah jelas instansi-instansi yang terlibat di dalamnya, peranan Kepala Daerah hanya mengkoordinasikan unit-unit organisasi yang terkait guna kelancaran pelaksanaan kegiatan tersebut.

tersebut apakah sudah sesuai dengan perilaku diatas. Waktu penelitian dimulai dari bulan Februari 2013 sampai dengan Oktober 2013.

2. Metode Penelitian

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan penelitian deskriptif yaitu menggambarkan atau melukiskan keadaan yang ada di lapangan. Sejalan dengan yang dikemukakan oleh Moleong (2006:18) penelitian deskriptif adalah untuk memberikan gambaran secara rinci mengenai suatu keadaan, gejala atau obyek tertentu pada saat penelitian dilakukan berdasarkan fakta yang tampak atau sebagaimana mestinya. Penulis mengolah data dengan menganalisis secara kualitatif dimana setelah semua data terkumpul, dianalisis secara kualitatif untuk kemudian ditarik kesimpulan. Sugiyono (2011:15) mendefinisikan metode penelitian kualitatif merupakan metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, di mana peneliti adalah instrumen kunci. Penggunaan metode kualitatif karena data yang dihasilkan dari penelitian ini berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang yang perilakunya diamati. Tujuan digunakan metode kualitatif adalah untuk menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari informan, terutama yang berkaitan dengan perilaku pemimpin dalam pelaksanaan PNM Mandiri Perdesaan di Kecamatan Putussibau Utara.

Penelitian ini dilakukan di Kantor Camat Putussibau Utara dengan waktu pelaksanaan penelitian dimulai sejak Surat Keputusan (SK) Penelitian dikeluarkan oleh Program Studi Ilmu Pemerintahan hingga berakhirnya proses penelitian. Alasan peneliti mengambil lokasi tersebut adalah karena ingin mengetahui perilaku camat dalam melakukan pembinaan terhadap pelaksanaan PNM Mandiri Perdesaan, khususnya Simpan Pinjam Perempuan (SPP). Untuk itu, peneliti perlu mengkaji bagaimana camat melaksanakan program

Adapun peran dari subjek penelitian adalah sebagai informan dalam penelitian, dalam menentukan informan dilakukan dengan menggunakan metode *purposive sampling*. Dalam Bungin (2010:53) *purposive sampling* yaitu penunjukan informan secara sengaja, di mana informan tersebut dirasa mengetahui tentang apa yang menjadi obyek penelitian kita. Pada penelitian ini yang menjadi informan adalah Bapak Ledung S.Sos yaitu camat Putussibau Utara, Bapak Yohanes Husin yaitu Kasi Ekbang (Pjok), Bapak Mahrul Kamri (Ketua UPK) dan Bapak Adam (Sekretaris UPK) mereka mengetahui jalannya setiap kegiatan PNM Mandiri Perdesaan termasuk SPP serta perwakilan dari masyarakat yang terlibat dalam program tersebut yaitu Bapak Muzzani, SE. Sedangkan Objek penelitiannya adalah sesuai dengan judul/ permasalahan yang diangkat oleh peneliti yaitu Perilaku Camat Dalam Pelaksanaan SPP PNM Mandiri Perdesaan Kecamatan Putussibau Utara Kabupaten Kapuas Hulu.

Adapun instrumen sebagai alat bantu yang digunakan dalam penelitian ini adalah pedoman wawancara, dokumen-dokumen, alat perekam suara, dan kamera. Kemudian kegiatan pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui wawancara mendalam dan dokumentasi.

Analisis data dalam penelitian kualitatif bersifat induktif, suatu analisis berdasarkan data yang diperoleh, selanjutnya dikembangkan pola hubungan tertentu atau menjadi hipotesis. Selanjutnya dicarikan data lagi secara berulang-ulang sehingga selanjutnya dapat disimpulkan apakah hipotesis tersebut diterima atau ditolak berdasarkan data yang terkumpul. Teknis analisis

data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan reduksi data, penyajian data, dan verifikasi.

Untuk mendapatkan data yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah, maka dari data-data yang ada terlebih dahulu dilakukan pemeriksaan keabsahannya. Dalam penelitian ini, teknik keabsahan data yang akan digunakan adalah teknik triangulasi. Terdapat 3 (tiga) jenis triangulasi, yaitu triangulasi sumber, triangulasi teknik, dan triangulasi waktu. Triangulasi sumber dilakukan dengan cara mengecek data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber. Triangulasi teknik dilakukan dengan cara mengecek data kepada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda. Sedangkan triangulasi waktu dapat dilakukan dengan cara melakukan pengecekan dengan wawancara, observasi atau teknik lain dalam waktu atau situasi yang berbeda. Di dalam penelitian ini, peneliti menggunakan triangulasi teknik dan triangulasi sumber. Untuk mendapatkan data dan informasi mengenai NPM Mandiri Perdesaan, peneliti mengumpulkan dokumen-dokumen berupa Surat Penetapan Camat, Petunjuk Teknis Operasional, serta foto-foto. Selain itu, peneliti juga mewawancarai subjek penelitian yaitu camat dan bawahannya.

C. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Perilaku Camat Dalam Pelaksanaan PNPM Mandiri di Kecamatan Putussibau Utara Kabupaten Kapuas Hulu.

- a. Camat tidak secara langsung menyebarkan informasi mengenai SPP PNPM Mandiri Perdesaan, ada dua konsultan yang menangani yaitu konsultan fasilitator dan konsultan teknik. Upaya sosialisasi dan penyebaran informasi dilakukan melalui dua cara, yakni pertemuan langsung dan melalui

media informasi dengan menggunakan media komunikasi/ informasi dan media alternatif lain, termasuk kegiatan yang sifatnya terbuka untuk umum. Masyarakat yang mengikuti kegiatan SPP diwajibkan datang dalam setiap forum-forum pertemuan dari tahap perencanaan sampai pelaksanaannya.

- b. Perilaku camat dalam konsultasi dan delegasi tentang pelaksanaan PNPM Mandiri Perdesaan juga sudah dilakukan cukup baik. Berdasarkan data yang didapat dari kantor PNPM Mandiri Perdesaan kecamatan Putussibau Utara, terdapat jadwal rapat koordinasi dan musyawarah tentang kegiatan SPP yang harus dihadiri oleh camat. Tiap bulan per tanggal 20 selalu dilakukan Rapat Koordinasi mengenai kegiatan PNPM Mandiri Perdesaan termasuk dalam hal tersebut adalah kegiatan SPP. Hal yang dikonsultasikan dan didelegasikan mengenai penyaluran dana, keadaan fisik dll.
- c. Dalam hal perencanaan tentang pelaksanaan PNPM Mandiri Perdesaan diawali dengan melakukan Musyawarah Antar Desa (MAD), Musyawarah Khusus Perempuan juga dilakukan untuk membahas gagasan-gagasan yang berasal dari kelompok-kelompok perempuan. Dalam hal pengorganisasian, camat harus mengembangkan motivasi bawahannya agar mereka mau bekerja guna mencapai sasaran organisasi yaitu pelaksanaan PNPM Mandiri Perdesaan. Tetapi camat selama menjalankan tugasnya jarang memberikan semangat dan dorongan, karena jarang berada di tempat. Hal tersebut membuat bawahannya kurang mendapat motivasi selama bekerja.

d. Masyarakat merupakan pelaku utama dalam program ini, pemerintah hanya sebagai pendamping dan pendukung. Peranan camat dalam hal ini sangat urgen, dapat mengendalikan perangkat dikecamatan untuk dapat memberikan pendampingan atau pengarahan utama dalam penyusunan administrasi kegiatan SPP sehingga penunggakan uang bisa teratasi. Camat juga dapat membangkitkan semangat masyarakat dengan berbagai model pendekatan yang dapat dilakukannya apabila camat yang bersangkutan mau dan berkomitmen untuk membangun wilayah dan masyarakatnya. Tingkat percaya diri masyarakat terutama peserta PNPM Mandiri semakin tinggi ketika camat dapat mengunjungi kelompok-kelompok peserta PNPM Mandiri. Untuk itu seharusnya camat perlu memperhatikan hal ini, agar dapat membagi waktu serta menjunjung tinggi peserta PNPM Mandiri.

2. Keterbatasan Studi

Selama melakukan penelitian tentang perilaku camat dalam pelaksanaan PNPM Mandiri Perdesaan Kecamatan Putussibau Utara Kabupaten Kapuas Hulu, peneliti mengalami kendala dimana menjadi keterbatasan-keterbatasan dalam penelitian ini adalah Penelitian ini menfokuskan pada perilaku pemimpin, karena peneliti melihat perilaku camat memiliki andil dalam penyelenggaraan sebuah program pemerintah. Meski demikian, peneliti menyadari bahwa, ada hal lain yang juga menarik untuk diteliti mengenai pemimpin atau camat pada khususnya. Oleh karena itu, peneliti mengharapkan agar hasil dari penelitian ini dapat disempurnakan oleh peneliti lain dengan metode dan analisis yang sama maupun berbeda. Kurangnya data mengenai gambaran wilayah umum kecamatan karena Monografi

Kecamatan terbaru belum selesai dikerjakan dan informan sulit ditemui dikarenakan kesibukannya.

3. Apresiasi

Pada kesempatan ini saya mengucapkan terima kasih kepada seluruh jajaran aparatur pemerintah di lingkungan Kantor Kecamatan Putussibau Utara yang telah mengizinkan peneliti untuk melakukan penelitian di tempat tersebut dan kemudian telah banyak memberikan bantuan kepada peneliti sehingga penelitian ini dapat terselesaikan.

DAFTAR PUSTAKA

a. Buku

- Afifuddin, Beni Ahmad Saebani. 2009. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung : Pustaka Setia.
- Bungin, Burhan. 2003. *Analisis Penelitian Kualitatif: Pemahaman Filosofis dan Metodologis Ke Arah Penguasaan Model Aplikasi*. Jakarta : Raja Grafindo Persada.
- Djarmiko, Yayat ayati. 2005. *Perilaku Organisasi*. Bandung : Alfabeta.
- Kaloh J. 2009. *Kepemimpinan Kepala Daerah*. Jakarta : Sinar Grafika.
- , 2006. *Pemimpin Antara Keberhasilan dan Kegagalan*. Kata Hasta Pustaka : Jakarta.
- Kartono, Kartini. 2010. *Pemimpin dan Kepemimpinan*. Jakarta : Raja Grafindo Persada.
- Moleong, Lexy J. 2010. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung : Remaja Rosdakarya.
- Pasolong, Harbani. 2008. *Kepemimpinan Birokrasi*. Bandung : Alfabeta.
- Safaria, Triantoro. 2004. *Kepemimpinan*. Yogyakarta : Graha Ilmu.

Siagian, SP. 2003. *Teori dan Praktek Kepemimpinan*. Jakarta : RinekaCipta

Sugiyono, 2011. *Metodologi Penelitian Kombinasi (Mixed Methods)*. Bandung : Alfabeta.

-----, 2011, *Metode Penelitian Pendidikan*. Bandung : Alfabeta.

-----, 2008. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*. Alfabeta : Bandung

-----, 2010. *Metode Penelitian Administrasi*. Bandung : Alfabeta.

Syafiie, Inu Kencana. 2003. *Kepemimpinan Pemerintahan Indonesia*. Bandung : Refika Aditama.

Tangkilisan, Hessel Nogi S. 2005. *Manajemen Publik*. Jakarta : Grasindo.

Thoha, Miftah. *Kepemimpinan Dalam Manajemen: Suatu Pendekatan Perilaku*. Jakarta : Raja Grafindo Pustaka.

-----, *Perilaku Organisasi: Konsep Dasar dan Aplikasinya*. Jakarta : Rajawali Pers.

Tohardi, Ahmad. 2008. *Petunjuk Praktis Menulis Skripsi*. Bandung: Mandar Maju.

Wahjono, Sentot Imam. 2010. *Perilaku Organisasi*. Yogyakarta : Graha Ilmu.

Pontianak Utara. (Skripsi). Universitas Tanjungpura.

Sihombing, Boy Reonaldi. 2009. *Peranan Camat Dalam Upaya Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM Mandiri Perdesaan) Studi pada Kecamatan Pancur Batu*. (Skripsi). Universitas Sumatera Utara.

c. Rujukan Elektronik

Ijul, Zulkifli. 2011. *Tugas dan Tanggung Jawab Camat*, mel lui <http://www.bintangs.web.id/2011/02/tugas-dan-tanggung-jawab-camat.html>

Akses tanggal 07 J ni 2013

Kementerian Dalam Negeri. 2012. *PNPM Mandiri Perdesaan*, melalui http://www.pnpm-perdesaan.or.id/?page=halaman&story_id=1

Akses tanggal 07 J ni 2013

b. Karya Tulis Ilmiah

Afriani, Liza. 2012. *Penerapan Nilai Budaya Kerja Pada Aparatur Pemerintahan Di Kantor Camat*

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS TANJUNGPURA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
PENGELOLA JURNAL MAHASISWA

Jalan A Yani Pontianak, Kotak Pos 78124

Homepage : <http://jurnalmahasiswa.fisip.untan.ac.id>

Email : jurnalmhs@fisip.untan.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH/PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK JURNAL ELEKTRONIK MAHASISWA

Sebagai sivitas akademika Universitas Tanjungpura, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama Lengkap : TIA ARNIYATI PERMATASARI
NIM / Periode lulus : E42009036/ 2013
Fakultas / Jurusan : FISIP / ILMU ADMINISTRASI
Email address/HP : tiaarniyatipermatasari@rocketmail.com/085750652277

demi pengembangan ilmu pengetahuan dan memenuhi syarat administrasi kelulusan mahasiswa (S1), menyetujui untuk memberikan kepada Pengelola Jurnal Mahasiswa Ilmu Administrasi pada Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif (*Non-Exclusive Royalti-Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul :

PERILAKU CAMAT DALAM PELAKSANAAN PNPM MANDIRI DI KECAMATAN
PUTUSSIBAU UTARA KABUPATEN KAPUAS HULU

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini, Pengelola Jurnal berhak menyimpan, mengalih-media/formatkan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di internet atau media lain :

- fulltext
 content artikel sesuai dengan standar penulisan jurnal yang berlaku.

untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/ pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak pengelola jurnal, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran hak cipta dalam karya saya ini.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Mengetahui/disetujui
Pengelola Jurnal... 10/2014

Dibuat di : Pontianak
Pada Tanggal : 6 Februari 2014

(TIA ARNIYATI PERMATASARI)